

**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NO 1 TAHUN 2015 TERHADAP  
PENDAPATAN NELAYAN KEPITING DI KELURAHAN  
NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

Oleh :

**HALYLYARTI**

**Nim : 26.13.3.092**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017 M / 1438 M**

## **PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

### **DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 1 TAHUN 2015 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KEPITING DI KELURAHAN NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

Oleh:

Halylyarti

Nim: 26.13.3.092

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Medan, 19 Juni 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Yafiz, M. Ag  
NIP. 19760423 200312 1 001

Muhammad Arif, MA

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Marliyah, M.A  
NIP. 197601262003122003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Halylyarti**  
Nim. : 26133092  
Tempat/tgl. Lahir : Medan Labuhan, 26 November 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Chaidir Blok CC No 38 Kelurahan Nelayan Indah  
Kecamatan Medan Labuhan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 1 TAHUN 2015 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KEPITING DI KELURAHAN NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 19 Juni 2017

Yang membuat pernyataan

**Halylyarti**

## ABSTRAK

Diberlakukannya Permen KP No. 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan tujuan untuk mengelola potensi sumberdaya Crustacea, disebabkan adanya fenomena semakin turunnya produksi Crustacea dan semakin kecilnya ukuran yang ditangkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak implementasi Permen KP No. 1/2015 tersebut terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan labuhan. Populasi penelitian ini adalah nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah yang berjumlah 235 orang dengan sampel 35 orang dengan mengambil 15% dari jumlah populasi. Data diambil menggunakan metode wawancara menggunakan uji t diperoleh nilai sig sebesar 0,000. Nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai sig ( $0,005 > 0,000$ ) maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Kemudian dari hasil wawancara dapat diketahui pendapatan nelayan berkurang sebelum adanya peraturan dan setelah adanya peraturan, dan dapat diketahui harga jual kepiting berkurang setelah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permen KP No. 1/2015 membawa dampak negatif terhadap nelayan tangkap kepiting dilihat dari berkurangnya pendapatan nelayan.

**Kata kunci:** Dampak, Permen KP No. 1/2015, Nelayan kepiting

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, berkat limpah dan rahmat taufiq, inayah, dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sesuai dengan kemampuan penulis. Rasa syukur itu semakin bertambah dalam diri penulis ketika skripsi ini dimunaqasahkan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi yang berjudul **“Dampak Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan”** melengkapi tugas akhir dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jurusan Ekonomi Islam prodi Ekonomi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU)

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menghadapi rintangan dan hambatan. Namun, Alhamdulillah berkat bimbingan dari Bapak Dr. M. Yafiz, MAg dan Bapak M. Arif, MA sebagai pembimbing I dan pembimbing II tersebut dapat diatasi. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rektor, Bapak Dekan, Bapak Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta seluruh civitas akademiaka Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan yang telah memberikan data dan informasi kepada penulis untuk mendukung penyelesaian skripsi ini.
3. Teristimewa untuk Ayahanda Amirsyah dan Ibunda tercinta Rani, saudara-saudaraku tersayang Eka Ningsih, Hari Chusnanto, Koko Handoka dan M. Ihsan serta seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
4. Ucapan terima kasih kepada rekan-rekan jurusan Ekonomi Islam sahabatku Atika Septiana Nst, Rahmiyanti Noer, dan Chairina serta seluruh keluarga EPS C

tercinta, dan kepada mamas yang selalu sabar mendampingi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik dari segi penulisan dan penyusunannya. Oleh karena itu, penulis masih menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penelitian ini.

Di samping itu, penulis juga berharap semoga skripsi ini ada manfaatnya bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Medan, 14 Juni 2017

Penulis

Halylyarti

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR TABEL .....vi

DAFTAR GAMBAR .....vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Pembatasan Masalah .....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Batasan Istilah .....	6

### BAB I KAJIAN TEORITIS PUSTAKA

A. Evaluasi Kebijakan .....	7
1. Evaluasi Kebijakan .....	7
2. Dampak Kebijakan.....	10
B. Pendapatan .....	11
1. Pengertian Pendapatan .....	11
2. Konsep Pendapatan Menurut Ilmu Ekonomi.....	13
3. Tingkat Pendapatan .....	13
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan .....	16
5. Pendapatan Dalam Perspektif Islam .....	18
C. Nelayan .....	19
1. Pengertian Nelayan .....	19
2. Tipologi Nelayan Berdasarkan Lingkungan.....	21
3. Posisi Nelayan Dalam Masyarakat Pesisir .....	22

4. Nelayan Berdasarkan Penggolongan sosialnya .....	22
D. Kajian Terdahulu .....	23
E. Kerangka Teoritis .....	26
F. Hipotesis Penelitian .....	27

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	28
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
C. Jenis dan sumber Data.....	29
D. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	29
E. Populasi Dan Sampel .....	30
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Defenisi Operasional.....	32
H. Teknik Analisis Data.....	33

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kelurahan Nelayan Indah .....	35
1. Kondisi Geografis Kelurahan Nelayan Indah .....	35
2. Tata Guna Lahan .....	36
3. Kondisi Demografi Kelurahan Nelayan Indah .....	36
a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	36
b. Penduduk Menurut Kepala Keluarga .....	37
c. Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	37
d. Penduduk Menurut agama .....	39
4. Sarana dan Prasarana.....	40
B. Deskripsi Data Penelitian .....	41
1. Karakteristik Responden .....	41
a. Umur Responden.....	41
b. Tingkat Pendidikan Responden .....	43
c. Status Kepemilikan Rumah .....	45
d. Tipe Bangunan Fisik Rumah .....	47
e. Jenis Perahu yang Digunakan .....	49
2. Deskripsi variabel Penelitian .....	51
a. Uji Normalitas.....	51

b. Uji T ( <i>T-Test</i> ) .....	52
C. Pembahasan.....	55
1. Persepsi Nelayan Kepiting .....	55
2. Dampak Permen KP No 1 Tahun 2015.....	56
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

#### **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 3.1 Jumlah nelayan Tangkap Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah .....</b>	<b>31</b>
<b>Tabel 4.1 Luas dan Jenis Penggunaan Lahan Kelurahan Nelayan Indah Tahun 2017 .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin .....</b>	<b>36</b>
<b>Tabel 4.3 Jumlah Kepala Keluarga Di Kelurahan Nelayan Indah .....</b>	<b>37</b>

<b>Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....</b>	<b>38</b>
<b>Tabel 4.5 Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan di Kelurahan Nelayan Indah.....</b>	<b>39</b>
<b>Tabel 4.6 Sarana Dan Prasarana di Kelurahan Nelayan Indah .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabel 4.7 Karakteristik Responden Menurut Umur.....</b>	<b>42</b>
<b>Tabel 4.8 Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan.....</b>	<b>44</b>
<b>Tabel 4.9 Status Kepemilikan Rumah Nelayan penangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan 2017 .....</b>	<b>46</b>
<b>Tabel 4.10 Tipe Bangunan Fisik Rumah nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah .....</b>	<b>48</b>
<b>Tabel 4.11 Jumlah Responden Menurut Jenis Perahu Yang Digunakan Nelayan Tangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. ....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel 4.12 Hasil Uji Normalitas.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.13 Paired Samples Correlations.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.14 Paired Samples Statistics0.....</b>	<b>53</b>
<b>Tabel 4.15 Hasil Uji t Paired Samples Test .....</b>	<b>54</b>
<b>Tabel 4.16 Jumlah Pendapatan Nelayan Sebelum dan sesudah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015.....</b>	<b>57</b>

#### **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 2.1 Kerangka Teoritis .....</b>	<b>26</b>
<b>Gambar 4.1 Umur Responden .....</b>	<b>43</b>
<b>Gambar 4.2 Tingkat Pendidikan Responden .....</b>	<b>45</b>
<b>Gambar 4.3 Status Kepemilikan Rumah Responden .....</b>	<b>47</b>
<b>Gambar 4.4 Tipe Bangunan Responden.....</b>	<b>49</b>
<b>Gambar 4.5 Perahu Yang Digunakan Responden .....</b>	<b>50</b>
<b>Gambar 4.6 Tanggapan Nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Terkait Permen No 1 tahun 2015.....</b>	<b>56</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pekerjaan adalah hal yang paling menentukan tingkat kelayakan hidup seseorang. Pekerjaan yang baik, imbalan yang cukup adalah impian semua orang. Karena, dengan memiliki pekerjaan yang baik, seseorang dapat memiliki kualitas hidup yang baik.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan.<sup>1</sup> Di Indonesia banyak masyarakat yang tinggal di pesisir pantai mengandalkan laut untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya. Laut adalah sumber mata pencaharian masyarakat disekitar pesisir pantai. Dengan begitu, banyak masyarakat yang hanya berprofesi sebagai nelayan hanya mengandalkan pendapatan dari hasil tangkapannya saja.

Secara geografis, Indonesia, sebagai negara bahari (*archipelagic state*), mempunyai luas wilayah yang membentang mulai dari 95° sampai dengan 141° BT dan diantara 60° LU dan 110° LS. Sedangkan luas wilayah perairan laut Indonesia tercatat mencapai kurang lebih 7,9 juta km<sup>2</sup>. Kalau dihitung, panjang pantai yang mengelilingi seluruh kepulauan Nusantara tercatat kurang lebih 81.000 km, serta jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir terdapat lebih dari 40 juta orang. Berdasarkan data yang ada pada UNCLOS 82, luas wilayah perairan Indonesia meliputi kawasan laut seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup> dan wilayah laut seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat besar baik dari segi kuantitas maupun keanekaragamannya. Total luas laut Indonesia sekitar 3,544 juta km<sup>2</sup> atau sekitar 70% dari wilayah Indonesia (KKP, 2012).

Profesi nelayan adalah profesi yang tidak mudah untuk dijalankan. Dikarenakan pendapatan dari hasil tangkap berfluktuasi. Sehingga, pendapatan tidak dapat diramalkan dari hari kehari. Selain itu, harga yang tidak dapat diramalkan pun dapat memicu pendapatan masyarakat berkurang.

---

<sup>1</sup> Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (PT Grafindo Persada, Jakarta, 2005), h. 171.

<sup>2</sup> Djoko Pramono, *Budaya Bahari*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2005), h. 2.

Produksi perikanan yang termasuk kelompok Crustacea di Indonesia diperkirakan mencapai 23% dari produksi perikanan total dunia. Produksi Crustacea sebesar ini senilai kurang lebih 2.5-6 Milyar USD, dan menduduki rangking pertama dalam perdagangan perikanan dunia (BPS, 2014). Berdasarkan data BPS tersebut, perikanan Crustacea Indonesia diperkirakan telah mencapai nilai kurang lebih 800 juta USD. Jepang, Hongkong, USA, Taiwan dan beberapa negara Eropa merupakan tujuan ekspor berbagai jenis Crustacea tersebut.<sup>3</sup>

Sejalan dengan tingginya permintaan produk jenis Crustacea sehingga semakin meningkatkan intensitas penangkapan Crustacea, terutama kepiting. Hal ini telah mendorong nelayan di Kelurahan Nelayan Indah untuk menangkap sebanyak-banyaknya dan cenderung mengabaikan kondisi perkembangbiakan maupun ukuran yang tertangkap. Berdasarkan fenomena tersebut, maka KKP telah menerbitkan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scylla spp*) dan Rajungan (*Portunus pelagicus*) dengan tujuan untuk mengelola potensi sumberdaya Crustacea. Permen KP No. 1/ 2015 pada Pasal 2 disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster, Kepiting dan Rajungan dalam kondisi bertelur dan ukuran minimal.

Permen KP No 1 tahun 2015 didasari oleh penurunan populasi Crustacea yang mengancam kepunahan, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penangkapan Kepiting, Lobster, Dan Rajungan yang berkondisi bertelur, jadi dapat ditegaskan bahwa tujuannya adalah kelestarian dan kemajuan sektor perikanan dan bukan untuk mematikan pencaharian nelayan.

Maksud diterbitkannya peraturan Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan Kepiting, Lobster, Dan Rajungan dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal adalah untuk melestarikan Crustacea yang mana penangkapan Crustacea dalam kondisi bertelur dianggap akan menurunkan populasi Crustacea tersebut. Tujuannya pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 adalah untuk melestarikan Crustacea yang mana dianggap jika Kepiting, Lobster, Dan Rajungan dibiarkan bertelur dan berkembangbiak maka, Kepiting, Lobster, Dan Rajungan akan melestarikan Crustacea tersebut.

Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan adalah wilayah pesisir Sumatera Utara, Indonesia. Kelurahan Nelayan Indah merupakan penghasil atau

---

<sup>3</sup> Imam Triaso, *Dampak Implementasi Permen KP No 1 Tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan di Jawa Tengah*, (Jurnal, Universitas Diponegoro, 2016), h.1.

produksi Kepiting yang cukup banyak. Jumlah seluruh nelayan 725 orang dan jumlah nelayan tangkap Kepiting di kelurahan ini sebanyak 235 orang. Adapun luas wilayah 420 Ha.

Sebelum adanya Permen KP No 1 Tahun 2015 ini semua nelayan mampu menghidupi keluarganya lebih dari cukup bahkan mereka dapat menabung. Namun, sejak adanya peraturan ini masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan menjadi tidak mampu menghidupi keluarganya, dikarenakan harga jual Kepiting menjadi anjlok. Implementasi Permen KP No 1 Tahun 2015 berdampak negatif terhadap pendapatan masyarakat.

Permen KP No 1 Tahun 2015 ini sangat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat disekitar pesisir khususnya nelayan Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Banyak masyarakat yang mengeluh karena hasil penjualan Kepiting menurun dikarenakan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Banyak masyarakat yang beralih profesi setelah peraturan ini keluar, selain itu pengusaha tambak Kepiting pun banyak yang gulung tikar dikarenakan peraturan ini.

Permen KP No 1 Tahun 2015 yang melarang penangkapan Kepiting yang berukuran minimal dan bertelur berdampak pada harga jual Kepiting yang bertelur menurun drastis. Yang semula per kilo dihargai Rp. 300.000 setelah pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 ini menjadi Rp. 50.000. Selain itu harga Kepiting jenis lain pun ikut terkena imbasnya seperti Kepiting jantan, yang mana sebelum pemberlakuan Permen Kp No 1 Tahun 2015 harga Kepiting jenis ini Rp 200.000 setelah pemberlakuan Permen Kp No 1 Tahun 2015 menjadi Rp. 70.000. Setelah peraturan ini keluar otomatis ekspor Kepiting bertelur dilarang. Padahal, jenis Kepiting ini sangat diminati oleh pasar internasional. Sehingga banyak pengusaha nakal yang tetap mengekspor Kepiting ini dengan cara ilegal namun dengan harga jual dipasaran yang mahal. Nelayan sangat dirugikan sekali oleh pengusaha-pengusaha nakal seperti ini. Mereka memainkan harga agar mendapat keuntungan yang besar. Namun, sangat merugikan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan yang hanya mengandalkan pendapatan dari hasil tangkap untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

selanjutnya Pasal 3 (ayat 1) dijelaskan bahwa penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dapat dilakukan dengan ukuran:

- a. Lobster ( *Panulirus spp* ) dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas delapan sentimeter);
- b. Kepiting ( *Scylla spp* ) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas limabelas sentimeter); dan
- c. Rajungan ( *Portunus pelagicus* ) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter). Dengan terbitnya Permen KP No. 1/2015 tersebut, maka perlu diteliti seberapa jauh dampaknya terhadap pendapatan nelayan Kepiting di kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan kepiting.

Dari latar belakang diatas, maka penulis bermaksud meneliti lebih lanjut dalam bentuk penulisan usulan penelitian dengan memilih judul penelitian: “Dampak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 Terhadap Pendapatan Nelayan Kepiting Di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan”.

## **B. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah diperlukan agar tidak meluasnya permasalahan yang ada. Pembatasan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah hanya meneliti dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 terhadap nelayan penangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan labuhan.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan masalah diatas maka dapat dilihat masalah yang dilihat oleh peneliti. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pendapatan nelayan Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan?

## **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dampak peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terhadap pendapatan nelayan Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan referensi dalam ilmu ekonomi.
  - b. Sebagai referensi bagi perpustakaan UIN SU sebagai bacaan yang dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya bagi pendapatan nelayan.
2. Manfaat Praktis
- a. Penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bergantung kepada penghasilan dari hasil tangkap nelayan. Dengan begitu masyarakat dapat kehidupan yang layak.
  - b. Penelitian ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan solusi kepada masyarakat Yang berprofesi sebagai nelayan agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu pemerintah juga dapat mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat.
  - c. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan.

## **F. Batasan Istilah**

### 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 1 Tahun 2015 Tentang PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.)

### 2. Pendapatan Menurut Sukirno.

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain.<sup>4</sup>

### 3. Nelayan

Pengertian nelayan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan (di laut).

---

<sup>4</sup>Sujarno, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 program studi magister ekonomi pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan. 2008.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Evaluasi Kebijakan**

##### **1. Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilakukan setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan. Ini tentunya dalam rangka menguji tingkat kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefisienannya. William N. Dunn menyatakan bahwa evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Pada dasarnya nilai juga dapat dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Evaluasi kebijakan adalah proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan yang ditentukan. Untuk memudahkan tentang pengukuran evaluasi kebijakan Badjuri & Yuwono menyajikan tabel indikator evaluasi kebijakan sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Input (masukan) adalah Masalah kebijakan publik ini timbul karena adanya factor lingkungan kebijakan publik yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan publik tersebut, yang berupa tuntutan-tuntutan, keinginan- keinginan masyarakat atau tantangan dan peluang, yang diharapkan segera diatasi melalui suatu kebijakan publik. Masalah itu dapat juga timbul justru karena dikeluarkannya suatu kebijakan publik baru. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah sumber daya pendukung dan bahanbahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan ? berapakah SDM (sumber daya), uang atau infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2. Process (proses) adalah Analisis proses tidak begitu berfokus pada isi kebijakan, namun lebih memfokuskan diri pada proses politik dan interaksi faktor-faktor lingkungan luar yang kompleks dalam membentuk sebuah kebijakan. bagaimanakah sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat ? bagaimanakah efektivitas dan

---

<sup>5</sup> Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2002), h, 140-141

efisiensi dari metode / cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut ?

3. Outputs (hasil) adalah produk Kebijakan publik berupa peraturan, Undang-Undang dan Perda yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Fokus penilaian adalah sebagai berikut : apakah hasil atau produk yang dihasilkan sebuah kebijakan publik ? berapa orang yang berhasil mengikuti program / kebijakan tersebut ?
4. Outcomes (dampak) adalah Kebijakan Publik berisikan hal yang positif dan negatif terhadap target group. Fokus penilaian adalah apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan? Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan? Adakah dampak negatifnya? Berapa seriuskah?

William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria-kriteria evaluasi kebijakan publik yaitu : <sup>6</sup>

- a. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.
- b. Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
- c. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat

---

<sup>6</sup> William N. Dunn, 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press), h, 429.

berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

- d. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- e. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Evaluators kebijakan harus mengetahui secara jelas aspek-aspek apa yang perlu dikajinya. Disamping itu harus mengetahui sumber-sumber informasi yang perlu dikejanya untuk memperoleh data yang valid. Selain mengetahui teknik analisis yang tepat untuk melakukan evaluasi. Sejumlah metode dapat digunakan untuk membantu dalam mengevaluasi kebijakan, namun hampir semua teknik yang ada dapat juga digunakan dalam hubungannya dengan metode-metode evaluasi lainnya.

## **2. Dampak Kebijakan**

Sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna bagi lingkungan kebijakan. sedangkan dampak negatif dimaksudkan sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan tidak diharapkan terjadi. Soemarwoto dalam giroth menyatakan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas.

Dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Menurut Anderson semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam bentuk efek simbolis atau efek nyata. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan pemerintah. Kegiatan ini diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit informasi mengenai outcome atau dampak

kebijakan public, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatikan perubahan yang terjadi dalam lingkungan atau sistem politik yang disebabkan oleh aksi politik.

Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Objek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas. Misalnya masyarakat miskin (berdasarkan kriteria tertentu), para pengusaha kecil, kelompok anak-anak sekolah yang termarginalkan, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan. Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus masa analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan kepada berbagai efek yang dimaksud. Disamping itu, perlu dipahami bahwa kebijakan kemungkinan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak diinginkan.

Ketika kita berbicara tentang *outcome* dalam evaluasi kebijakan, maka sedikitnya mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang ingin kita selesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan, bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya, dan bila ada, apa yang kita kerjakan terhadap hasil yang dicapai (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu).

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi menurut Agustino<sup>7</sup>

1. Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dengan melibatkan masyarakat. Pertama-tama harus didefinisikan siapa yang akan terkena pengaruh kebijakan. Lebih lanjut lagi harus dicatat pula bahwa kebijakan dapat mempunyai akibat yang diharapkan atau yang tidak diharapkan.
2. Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain, atau dapat disebut juga dengan eksternalitas atau *spillover effect*.
3. Kebijakan dapat mempunyai pengaruh dimasa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang pada saat ini.
4. Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang *merupakan* pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya. Seperti biaya sering tidak dipertimbangkan dalam pembuatan evaluasi kebijakan setidaknya sebagian ada yang menentang perhitungannya

---

<sup>7</sup> Agustino, Leo, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung : CV Alfabetha, 2006), h, 191.

## **B. Pengertian Pendapatan**

### **1. Pengertian Pendapatan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>8</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan, dan organisasi lain dalam bentuk upah gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.<sup>9</sup>

Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan/profit. Namun ada perbedaan pada pendapatan dari perusahaan dagang, karena diperoleh dari penjualan barang dagangan.<sup>10</sup> Ada beberapa ahli mengemukakan tentang pengertian pendapatan, yaitu:

- a. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2009 yang dikutip oleh Suhartana bahwasanya pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.
- b. Menurut Baridwan yang dikutip Inayah Nurul pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu dalam usaha atau pelunasan hutangnya (kombinasi keduanya) selama satu periode yang bersala dari penyerahan atau pembuatan barang penyerahan jasa atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain.<sup>11</sup>

- a. Pendapatan Pribadi, yaitu semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu negara.

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 185.

<sup>9</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 230.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 168.

<sup>11</sup> Sujarno, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 program studi magister ekonomi pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan. 2008), h. 27.

- b. Pendapatan disposibel, yaitu pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
- c. Pendapatan nasional, yaitu nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu tahun.<sup>12</sup>

Sehingga dapat didefinisikan pendapatan adalah aliran masuk pada perusahaan yang diperoleh dari aktifitas kerja ataupun produksi dimana berdampak menambah aktiva perusahaan dengan maksud menambah pemasukan

## **2. Konsep pendapatan menurut Ilmu Ekonomi**

Pendapatan merupakan nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitatif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Secara garis besar, pendapatan adalah jumlah harta kekayaan awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode, bukan hanya yang dikonsumsi. Definisi pendapatan menurut ilmu ekonomi menutup kemungkinan perubahan lebih dari total harta kekayaan, badan usaha awal periode dan menekankan pada jumlah nilai yang statis pada akhir periode.

Definisi pendapatan antara para akuntan dengan para ahli ekonomi sangat jauh berbeda, demikian juga sesama para akuntan, yang mendefinisikan pendapatan berbeda satu sama lainnya. Akan tetapi pada umumnya definisi ini menekankan kepada masalah yang berkenaan dengan pendapatan yang dinyatakan dalam satuan uang. Pandangan akuntansi memiliki keanekaragaman

dalam memberikan definisi pendapatan. Ilmu akuntansi melihat pendapatan sebagai sesuatu yang spesifik dalam pengertian yang lebih mendalam dan lebih terarah. Konsep ini sebagian besar mengikuti prinsip – prinsip pendapatan, prinsip biaya, prinsip penandingan dan pernyataan periode akuntansi.

## **3. Tingkat Pendapatan**

Tingkat merupakan susunan berlapis-lapis, atau tinggi rendahnya. Sedangkan secara umum pendapatan diartikan penerimaan hasil usaha masyarakat dalam bentuk

---

<sup>12</sup> *Ibid*

uang.<sup>13</sup> Jadi, tingkat pendapatan adalah suatu bentuk hasil usaha baik berupa barang produksi, jasa, maupun bentuk uang, yang mana berfungsi sebagai alat ukur kemampuan masyarakat ataupun negara dalam hal perekonomian yang mana dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Atau dengan kata lain tingkat pendapatan adalah suatu ukuran untuk memenuhi status ekonomi seseorang.

Menurut Yudhohusodo, tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam empat golongan, yaitu:

1. Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 perbulan.
2. Golongan berpenghasilan sedang (*moderate income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 – Rp. 450.000 perbulan.
3. Golongan berpenghasilan menengah (*middle income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima Rp. 150.000 – Rp. 900.000 perbulan.
4. Golongan berpenghasilan tinggi (*high income group*) yaitu pendapatan rata-rata yang diterima lebih dari Rp. 900.000 perbulan.

Pendapatan nelayan tangkap kepiting dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Pendapatan hasil melaut

Pendapatan hasil melaut nelayan tangkap kepiting yaitu sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh nelayan tangkap kepiting untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa hasil tangkapan kepada pengepul atau tengkulak.

b. Pendapatan sampingan nelayan tangkap kepiting

Pendapatan sampingan nelayan tangkap kepiting adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh nelayan tangkap kepiting untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan diluar kegiatan melaut seperti hasil tambak, berdagang, mengojek, dan lain-lain.

Pendapatan nelayan dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

1. Pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh nelayan dalam usaha melaut selama satu bulan yang dihitung dari hasil penjualan atau pertukaran hasil melaut yang dinilai dalam rupiah

---

<sup>13</sup> Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2000), h.14

berdasarkan harga per satuan jenis tangkapan dan berat pada saat pemungutan hasil.

2. Pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh nelayan dalam satu bulan dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan melaut.

Biaya melaut meliputi biaya riil alat tangkap dan pengeluaran untuk melaut seperti rokok sekaligus makanan minuman saat melaut. Didalam pendapatan rumah tangga nelayan tangkap kepiting terdapat dua unsur perhitungan yang digunakan yaitu pendapatan nelayan tangkap kepiting itu sendiri dan penerimaan bantuan dari anggota keluarga lain. Penerimaan bantuan dari anggota keluarga lain adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh keluarga nelayan perahu rakit untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan oleh anggota keluarga selain kepala keluarga untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Tolak ukur pendapatan rumah tangga yang sangat penting untuk melihat kesejahteraan nelayan adalah pendapatan rumah tangga, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan tergantung pada tingkat pendapatan nelayan. Besarnya pendapatan nelayan itu sendiri akan mempengaruhi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi yaitu, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Nelayan dipedesaan khususnya nelayan penangkap kepiting sangat tergantung dari pendapatan di sektor perikanan sehingga kesejahteraan para nelayan tergantung pada laut. Keluarga pada umumnya terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa orang anggotanya. Kepala rumah tangga adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap rumah tangga tersebut, sedangkan anggota keluarga atau rumah tangga adalah mereka yang hidup dalam satu atap dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang bersangkutan. Tingkat pendapatan rumah tangga merupakan indikator yang penting untuk mengetahui tingkat hidup rumah tangga. Umumnya pendapatan rumah tangga di pesisir tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber penerimaan. Tingkat pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga nelayan. Tingkat pendapatan yang rendah mengharuskan anggota rumahtangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapatan keluarga diharapkan mencerminkan tingkat kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki nelayan. Pendapatan besar

mencerminkan tersedianya dana yang cukup untuk pemenuhan pola konsumsi selanjutnya dan pendapatan yang rendah menyebabkan menurunnya pola konsumsi dan pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan yang tidak mendasar. Terdapat tiga ukuran pendapatan:

1. Pendapatan Kerja Nelayan

Pendapatan ini diperoleh dengan menghitung semua penerimaan yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran maupun pemenuhan kebutuhan serta kewajiban seperti hutang.

2. Pendapatan Kerja Sampingan Nelayan

Pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan melaut, menghitung semua pendapatan sampingan dari nelayan guna mencukupi kebutuhan serta ukuran pendapatan .

3. Pendapatan Kerja Keluarga Nelayan

Pendapatan yang diperoleh dari melaut dan kerja selain nelayan yang dilakukan kepala rumah tangga dan anggotanya yang bertujuan untuk menambah penghasilan rumah tangga. Angka ini diperoleh dengan menghitung pendapatan dari sumber-sumber lain yang diterima nelayan bersama keluarga disamping kegiatan pokoknya.

## **5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan nelayan**

- a. Modal

Setiap produksi sub sektor perikanan dipengaruhi oleh faktor produksi modal kerja, makin tinggi modal kerja per unit usaha yang digunakan maka diharapkan produksi ikan akan lebih baik.

Sebagian dari modal yang dimiliki oleh nelayan digunakan sebagai biaya produksi atau biaya operasi operasi, yaitu penyediaan input produksi (sarana produksi), biaya operasi dan biaya-biaya lainnya dalam suatu usaha kegiatan nelayan. Biaya produksi atau biaya operasi nelayan diperoleh dari kelompok nelayan kaya ataupun pemilik modal (toke), karena adanya hubungan pinjam meminjam uang sebagai modal kerja dimana pada musim panen, hasil tangkapan (produksi) ikan nelayan digunakan untuk membayar seluruh pinjaman hutang, dan tingkat harga ikan biasanya ditentukan oleh pemilik modal.

Total biaya diklasifikasikan menjadi dua yaitu biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variabel cost*), biaya tetap (FC) adalah biaya yang relatif tetap jumlahnya dan terus dikeluarkan walaupun hasil tangkapan ikan/produksi yang diperoleh banyak atau sedikit, biaya variabel (VC) adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan/produksi yang diperoleh, contohnya biaya tetap (FC) dan biaya variabel (VC), maka:

$$TC = FC + VC.$$

b. Tenaga kerja

Setiap usaha kegiatan nelayan yang akan dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja, banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan harus sesuai dengan kapasitas perahu yang dioperasikan sehingga mengurangi biaya melaut yang diharapkan pendapatan nelayan akan lebih meningkat.

c. Jarak tempuh

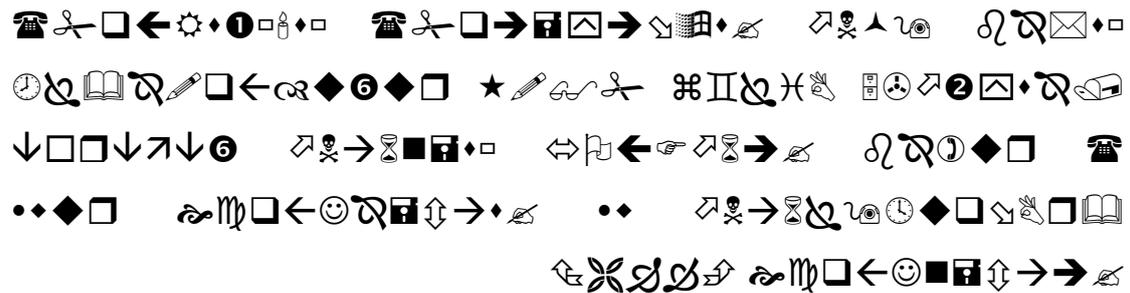
Pola penangkapan ikan yang lazim dilakukan nelayan yang pertama adalah pola penangkapan lebih dari suatu hari. Penangkapan seperti ini merupakan penangkapan ikan lepas pantai. Jauh dan dekatnya daerah tangkapan dan besar kecilnya perahu yang digunakan menentukan lamanya melaut. Kedua adalah pola penangkapan ikan satu hari, biasanya nelayan berangkat melaut sekitar 14.00 mendarat kembali sekitar jam 09.00 hari berikutnya. Penangkapan ikan seperti ini biasanya dikelompokkan juga sebagai penangkapan ikan lepas pantai. ketiga pola penangkapan ikan tengah hari. Penangkapan ikan seperti ini merupakan penangkapan ikan dekat pantai. umumnya mereka berangkat sekitar jam 03.00 dini hari atau setelah subuh, dan kembali mendarat pagi harinya sekitar jam 09.00. pada umumnya penangkapan ikan lepas pantai yang dilakukan dalam waktu yang lebih lama dan lebih jauh dari daerah sasaran tangkapan ikan mempunyai lebih banyak kemungkinan memperoleh hasil tangkapan (produksi) yang lebih banyak dan tentu memberikan pendapatan lebih besar dibandingkan dengan penangkapan ikan di dekat pantai.

d. Faktor pengalaman

Semakin berpengalamannya nelayan dalam menangkap ikan, maka akan meningkatkan hasil tangkapan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

## 6. Pendapatan Dalam Perspektif Islam

Pendapatan atau upah dapat didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang salah dari majikan. Prinsip ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 279



Artinya:”Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam Al-Qur’an Allah SWT juga menganjurkan kita agar memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mencari penghasilan berupa pendapatan yang tertuang dalam Al-Qur’an pada surah Al-Jumu’ah (62) 10



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.<sup>14</sup>

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa umat Islam jika telah selesai menunaikan sholatnya, diperintahkan oleh Allah SWT untuk berusaha atau bekerja

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri) 2009, h. 203.

agar memperoleh karunia-Nya berupa penghasilan ataupun pendapatan, ilmu pengetahuan, harta benda, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian umat Islam diperintahkan juga agar senantiasa mengingat Allah SWT di dalam maupun diluar ibadah shalatnya, dan selalu berikhtiar dengan giat berusaha untuk mencapai tujuan yang baik, mulia di sisi-Nya dan terhormat dipandang manusia dengan landasan nilai syariat Islam. Sehingga nantinya dapat menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.

## C. Nelayan

### 1. Pengertian Nelayan

Memberikan definisi nelayan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan.<sup>15</sup> Pengertian nelayan menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan.<sup>16</sup>

Menurut Brandt nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.<sup>17</sup>

Ditjen Perikanan mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Mulyadi S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, PT Grafindo Persada, Jakarta, h. 171.

<sup>16</sup> <http://kbbi.web.id/nelayan>.

<sup>17</sup> Marhaeni Ria Siambo, *Perikanan Nasional dan Internasional*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h, 3.

<sup>18</sup> Arif Satria, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Jakarta:yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h, 27.

Selanjutnya Ditjen Perikanan mengklasifikasikan nelayan berlandaskan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan /pemeliharaan, yaitu:

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan / petani ikan yang seluruh waktunya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/ pemeliharaan ikan/ binatang air lainnya/ tanaman air
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan /pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air. Selain melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain.
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan/ petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/ pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/ tanaman air.

## **2. Tipologi Nelayan Berdasarkan Lingkungan**

Charles mendefinisikan tipologi nelayan berdasar pada unsur ekologi (lingkungan), pada human system dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori nelayan yaitu:

1. *Subsistence fisher*, nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari.
2. *Native indigenous aboriginal fisher*, kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsiten.
3. *Recreational fisher*, nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja.
4. *Commercial fisher*, nelayan yang menangkap komoditas perikanan dalam memenuhi pasar domestik maupun ekspor, yang tergolong menjadi dua kategori yaitu nelayan artisanal dan nelayan industri.<sup>19</sup>

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap , nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h, 32

- a. Nelayan buruh, Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan juragan, dan Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan orang lain.
- c. Nelayan perorangan. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.<sup>20</sup>

### **3. Posisi Nelayan dalam Masyarakat Pesisir**

Menurut Kusnadi, dalam perspektif stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat pesisir bukanlah masyarakat yang homogeny. Masyarakat pesisir terbentuk oleh kelompok-kelompok sosial yang beragam.<sup>21</sup>

Dilihat dari aspek interaksi masyarakat dengan sumberdaya ekonomi yang tersedia di kawasan pesisir, masyarakat pesisir terkelompok sebagai berikut:

- a. Pemanfaat langsung sumberdaya lingkungan, seperti nelayan (yang pokok), pembudidaya ikan di perairan pantai (dengan jarring apung atau karamba), pembudidaya rumput laut/mutiara, dan petambak.
- b. Pengolah hasil ikan atau hasil laut lainnya, seperti pemindang, pengering ikan, pengasap, pengusaha terasi/krupuk ikan/tepung ikan, dan sebagainya, dan;
- c. Penunjang kegiatan ekonomi perikanan, seperti pemilik toko atau warung, pemilik bengkel (montir dan las), pengusaha angkutan, tukang perahu dan buruh kasar (*manol*).

### **4. Nelayan Berdasarkan Penggolongan Sosialnya**

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup> Kusnadi, *Keberdayaan Kelayanan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. (Yogyakarta : Ar- Ru zz Media:2009), h, 66.

buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal yang diinvestasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.<sup>22</sup>

Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai ekonomi membuat nelayan dapat dibagi menjadi beberapa kategori menurut kepemilikan kapalnya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Nelayan pemilik, nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut ke laut untuk memperoleh hasil laut.
- b. Nelayan juragan, nelayan yang membawa kapalorang lain tetapi ia tidak memiliki kapal.
- c. Nelayan buruh, nelayan yang hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkap ikan.

Nelayan adalah orang/individu yang aktif dalam melakukan penangkapan ikan dan binatang air lainnya. Tingkat kesejahteraan nelayan sangat ditentukan oleh hasil tangkapannya. Banyaknya tangkapan tercermin juga besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan yang nantinya sebagian besar digunakan untuk konsumsi keluarga. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterimanya.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berakaitan dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Hendra Sumanto dengan judul “Dampak Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Terhadapn Kondisi Sosial, Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota TanjungPinang (Studi Kasus Kelurahan Senggarang),

---

<sup>22</sup> Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, (Surabaya: In-Trans Publishing, 2013), h. 53.

<sup>23</sup> Mubyarto, *Nelayan dan kemiskinan*,(Jakarta: Rajawali, 1984), h. 63.

menyatakan bahwa Permen KP No. 2 Tahun 2015 membawa dampak terhadap kondisi sosial Ekonomi masyarakat nelayan kota TanjungPinang pada kelurahan Senggarang. Hal ini dapat dilihat dari:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa Permen Kp No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik membawa pengaruh terhadap banyak pihak khususnya nelayan. Pengaruh yang paling dirasakan masyarakat nelayan adalah turunnya jumlah tangkapan ikan yang berdampak pada jumlah pendapatan mereka. Dampak ekonomi terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga sebelum adanya Peraturan menteri ini produksi ikan yang didapatkan nelayan 1 hari bisa mencapai 15 hingga 25 kg dengan pendapatan 300 hingga 500 ribu. Namun, setelah adanya peraturan tersebut banyak nelayan yang akhirnya tidak dapat melaut lagi, produksi ikan pun menurun. Sejak dikeluarkannya Permen-Kp No. 2 Tahun 2015 aktifitas nelayan ada yang terhenti namun ada juga yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi dengan alasan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari nelayan. Peraturan ini dianggap akan mematikan mata pencaharian ribuan nelayan di Indonesia termasuk nelayan kecil karena sebahagian besar jenis alat tersebut dioperasikan oleh nelayan skala kecil.<sup>24</sup>

Kemudian pada skripsi yang ditulis oleh Roni Suhendar yang berjudul “The Impact Of Permen-KP No.2 Tahun 2015 Policy About Prohibition On Operating Cantrang (Catching Tool) To The Economic Condition Of Fishermen In Raja Bejamu Village, Sinaboi District, Rohil, Riau Province. Penelitian ini menyatakan dampak kebijakan No. 2 Tahun 2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang terhadap ekonomi masyarakat nelayan di desa Raja Bejamu, maka kesimpulan dari penelitiannya adalah:

1. Kebijakan pelarangan kapal cantrang untuk melaut diberi waktu sampai 2 atau 3 tahun lagi untuk bisa memiliki waktu untuk konversi ke alat tangkap yang diijinkan.
2. Konversi alat tangkap cantrang ke alat tangkap yang ramah lingkungan membutuhkan waktu yang lama dan dana yang banyak, sedangkan nelayan

---

<sup>24</sup> Hendra Sumanto, “Dampak Peraturan Menteri No. 2 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik Terhadapn Kondisi Sosial, Ekonomi Masyarakat Nelayan Kota TanjungPinang (Studi Kasus Kelurahan Senggarang),”(Jurnal, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016), h. 25.

memiliki kapal cantrang itu mayoritas dengan jalan berhutang. Harusnya nelayan diberi kelonggaran waktu untuk bisa menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

3. Jika dengan peraturan ini secara tegas dilarang dampak terhadap produksi nelayan perbulan mencapai 8,3 ton dan menelantarkan tenaga kerja sebanyak 476 nelayan cantrang.<sup>25</sup>

Dan skripsi yang ditulis oleh Imam Triaso yang berjudul Dampak Implementasi Permen KP No 1 Tahun 2015 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Nelayan Di Jawa Tengah. Maka kesimpulan dari penelitiannya adalah:

1. Dengan diberlakukannya Permen KP No. 1/2015 dilihat dari nilai ekonomi dan dari nilai sosial, ternyata berdampak positif terhadap nelayan Lobster di pangsela Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Kebumen. Pendapatan yang diperoleh nelayan Lobster justru semakin meningkat, karena dengan menangkap Lobster seperti yang diamanatkan Permen KP No.1/2015 harga yang diterima nelayan dari para bakul pengumpul/pengepul menjadi lebih tinggi. Selain itu secara sosial tidak pernah menimbulkan kecemburuan dikarenakan semua nelayan di Kabupaten Kebumen telah mengerti dan mentaati tujuan ditetapkannya Permen KP No. 1/2015 tersebut.
2. Adapun bagi nelayan Rajungan di pantura Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Demak dengan adanya Permen KP No. 1/2015 ternyata tidak berdampak positif, terutama dari nilai ekonomi. Hal ini karena permintaan Rajungan masih tetap tinggi, walaupun kondisi bertelur tidaknya Rajungan maupun ukurannya kecil masih dibeli oleh para bakul pengumpul/pengepul. Sedangkan dari nilai sosial ternyata berdampak negatif, karena pemberlakuan Permen KP No.1/2015 tersebut tidak diimbangi dengan adanya pengawasan atau tindakan hukum bagi para pelanggar Permen KP No. 1/2015 sehingga justru telah menimbulkan kecemburuan sosial antar nelayan setempat dan luar daerah.
3. Dengan diberlakukannya Permen KP No. 1/2015 bagi pihak *miniplant* maupun pabrik pengolahan Rajungan sebenarnya disambut dengan positif, karena kualitas dan ukuran daging Rajungan akan menjadi semakin baik dan

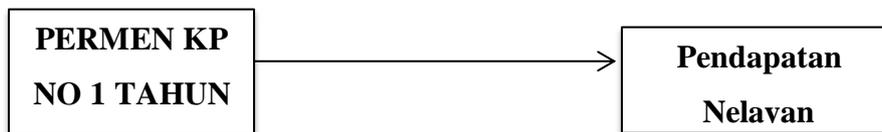
---

<sup>25</sup> Roni Suhendar, "The Impact Of Permen-KP No.2 Tahun 2015 Policy About Prohibition On Operating Cantrang (Catching Tool) To The Economic Condition Of Fishermen In Raja Bejambu Village, Sinaboi District, Rohil, Riau Province.", (Jurnal, Universitas Riau, 2016), h. 12.

meningkatkan harganya. Namun, mengingat bahwa hasil tangkapan Rajungan yang diperoleh nelayan umumnya semakin berkurang sehingga pihak pabrik pengolahan masih memberikan toleransi menerima Rajungan maupun daging Rajungan yang telah dikupas meskipun ukurannya masih dibawah standar yang diatur dalam Permen KP No. 1/2015 tersebut.

Dari penelitian di atas terdapat perbedaan baik dari segi periode penelitian dan lokasi penelitian, Penelitian ini dilakukan pada periode 2016 desember dan penelitian yang ini melihat pengaruh pendapatan nelayan dengan adanya Permen KP No. 1 Tahun 2015 yang jelas berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### **E. Kerangka Teoritis**



**GAMBAR 2.1**

#### **Kerangka Teoritis**

#### **F. Hipotesis**

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematis atau langkah-langkah penelitian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris yang datanya berbentuk angka-angka.<sup>26</sup> Metode kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat

---

<sup>26</sup> Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Ciptapustaka Media, Bandung:2012), h. 39.

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.<sup>27</sup>

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Selanjutnya hipotesis akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.<sup>28</sup>

Sesuai dengan permasalahannya, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ho = Rata-rata pendapatan sebelum adanya permen KP No 1 tahun 2015 sama dengan rata-rata sesudah adanya permen KP No 1 tahun 2015

Ha = Rata-rata pendapatan sebelum adanya permen KP No 1 tahun 2015 tidak sama dengan rata-rata sesudah adanya permen KP No 1 tahun 2015

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Mixed Methods*, (Bandung:ALFABETA, 2013), h. 11.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2015), h. 96.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara terhadap responden kemudian dilakukan analisis untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan maksud penilaian dengan menggunakan data *numeric* (angka) akan lebih pasti kemudian dapat diketahui lebih dalam dampak dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan.

#### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga organisasi. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subjek penelitian inilah terdapat objek penelitian.<sup>29</sup> Informan sebagai subjek penelitian ini adalah nelayan penangkap kepiting.

Teknik penentuan informan yang digunakan adalah *nonprobability sampling* yakni teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (*informan*) berdasarkan keputusan dari peneliti sendiri. Jenis *nonprobability* sampling yang digunakan yakni *sampling convenience* yakni teknik penentuan sampling berdasarkan kemudahan menentu informan yaitu siapa saja yang paling mudah ditemui peneliti.

Objek penelitian yang dimaksud adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti. Kemudian dipertegas objek penelitian adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam tulisan ini adalah pendapatan nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.

Subjek penelitian ini adalah nelayan penangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan labuhan. Sedangkan objek penelitian ini adalah pendapatan nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamtan Medan Labuhan.

---

<sup>29</sup> Ruslam Ahmadi, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2014), h.36.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Ada dua jenis data dalam penelitian ini, yaitu

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau dari lokasi objek penelitian yang diperoleh di lapangan.<sup>30</sup> Untuk data primer diperoleh langsung dari hasil kuisioner yang diberikan kepada nelayan penangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara.<sup>31</sup> Adapun data sekundernya data-data yang mendukung data primer yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan, arsip-arsip (dokumen-dokumen), buku-buku referensi, jurnal, dan internet serta literatur-literatur pustaka lainnya.

### **D. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Jl. Chaidir kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan dan waktu penelitiannya mulai dari bulan februari sampai dengan selesai.

### **E. Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian baik yang terdiri dari benda nyata, abstrak, peristiwa maupun gejala yang merupakan sumber data yang memiliki karakter tertentu dan sama. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan yang berjumlah 235 nelayan, sehingga dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan sampel. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Suharsini Arikunto bahwa: “untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga

---

<sup>30</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

<sup>31</sup> *Ibid.*

penelitiannya adalah penelitian populasi . tetapi, jika jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25%

Untuk itu maka dalam penelitian ini dilakukan penarikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian sampel.

## 2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti, lebih lanjut menurut Sugiyono bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling aksidental* ( *accidental sampling* ) adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>32</sup>

Adapun perincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3.1**

**Jumlah Nelayan Tangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah**

No	Lingkungan	Populasi	Sampel
1	Lingkungan I	30	4
2	Lingkungan II	18	3
3	Lingkungan III	38	6
4	Lingkungan IV	29	4
5	Lingkungan V	36	5
6	Lingkungan VI	40	6
7	Lingkungan VII	12	2
8	Lingkungan VIII	32	5

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, ( Bandung, Alfabeta, 1999), h 77

Total	235	35
-------	-----	----

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah

Berdasarkan data yang diperoleh pengambilan sampel diambil sebesar 15% dari jumlah populasi. Sehingga jumlah sampelnya yaitu 35 nelayan penangkap kepiting dari 235 nelayan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:<sup>33</sup>

### 1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah pengumpulan data yang bersumber dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui dokumen yang ada di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.

### 2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Nelayan tangkap kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.

### 3. Kuesioner (Angket)

Merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui oleh responden. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Metode ini digunakan untuk mencari data primer untuk pengumpulan data tentang dampak permen KP No 1 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan. Adapun jenis kuisisioner ini adalah terbuka dan tertutup.

## G. Defenisi Operasional

---

<sup>33</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 109.

Definisi operasional variabel diperlukan untuk menjelaskan variabel yang diidentifikasi sebagai upaya pemahaman dalam penelitian. Definisi variabel yang diteliti adalah sebagai berikut:

#### 1. Permen KP No 1 Tahun 2015

Permen KP No 1 Tahun 2015 ini berisikan tentang larangan penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan dengan pertimbangan:

- a. Bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
- b. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);

Yang boleh ditangkap:

*Periode Januari 2015-Desember 2015:*

- a. Lobster >200 gram
- b. Kepiting >200 gram
- c. Rajungan >55 gram
- d. Kepiting Soka >150 gram
- e. Periode Januari 2016 dan seterusnya:
- f. Lobster panjang kerapas >8 cm dan >300 gram
- g. Kepiting lebar kerapas >15 cm dan >350 gram
- h. Rajungan lebar kerapas >10 cm dan >55 gram

#### 2. Pendapatan Nelayan

Menurut Brandt nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

## H. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi normal atau tidak.

### 2. Uji T (*T-Test*)

Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan. Perhitungan t (uji t) merupakan suatu perhitungan untuk mencari perbedaan atau uji beda. Nilai dari uji t sebelum peraturan yang telah diketahui kemudian dibandingkan dengan nilai t sesudah peraturan. Rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dikatakan berbeda signifikan terhadap rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan apabila nilai signifikan  $> 0.05$ . Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti dari rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dan sesudah peraturan. Sebaliknya, apabila nilai signifikan  $< 0.05$  tidak terdapat perbedaan yang berarti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan**

Gambaran daerah penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu keadaan fisik maupun sosial di daerah penelitian. Dalam penelitian ini keadaan geografis Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan dapat dilihat dari letak, luas, dan batas wilayah

##### **1. Kondisi Geografis Kelurahan Nelayan Indah**

Kelurahan Nelayan Indah merupakan sebuah Kelurahan yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan dengan luas wilayah 420 Ha. Letak administratif suatu daerah merupakan letak yang berdasarkan pembagian wilayah administratif pemerintah. Adapun batas-batas administratif Kelurahan Nelayan Indah adalah sebagai berikut:

Batas Wilayah Kelurahan Nelayan Indah

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sei. Deli/Kel. Belawan Bahari
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kel.Sei Mati
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Lubuk Tiram/Sei. Pengatalan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Sei Mati

Kelurahan Nelayan Indah terletak dikecamatan Medan Labuhan kota Medan dengan luas wilayah 420 Ha, jumlah penduduk 8.513, terdiri dari 4.404 laki-laki dan 4.109 perempuan. Dengan total kepala keluarga 2.012 KK.

Kelurahan Nelayan Indah berjarak hanya 6 Km dari ibukota kecamatan, 60 Km dari ibukota provinsi. Dari jarak tersebut dapat diasumsikan bahwa sudah dapat menerima arus informasi dari luar daerah dengan cepat. Karena kelurahan ini sudah dekat dengan ibukota provinsi dan transportasi menuju kelurahan sudah cukup baik, sehingga akan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan kelurahan tersebut.

##### **2. Tata Guna Lahan**

Luas Kelurahan Nelayan Indah 420 Ha, yang terbagi fungsinya menjadi areal pemukiman, tambak, hutan, perkuburan, jalan, bangunan, dan lain-lain. Keadaan luas dan jenis penggunaan lahan Kelurahan Nelayan Indah dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**

**Luas dan Jenis penggunaan lahan Kelurahan Nelayan Indah Tahun 2017**

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas ( Ha )	Persentase
1	Pemukiman	85	20,24
2	Tambak	150	35,71
3	Hutan	92	21,90
4	Rawa-rawa	80	19,04
5	Perkuburan, jalan, bangunan, dan Lain-lain	12	12,86
Total		420	100

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa penggunaan untuk pemukiman sebanyak 85 Ha ( 20,24% ), tambak 150 Ha ( 35,37% ), dan untuk perkuburan, jalan, dan lainnya sebanyak 12 Ha ( 2,86% ) sedangkan sisanya merupakan areal hutan dan rawa-rawa.

**3. Kondisi Demografi Kelurahan Nelayan Indah**

a. Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kelurahan Nelayan Indah.

**Tabel 4.2**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	4.404	51,73
2	Perempuan	4.109	48,26
Jumlah		8.513	100

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Nelayan Indah sebanyak 8.513 orang yang terdiri 4.404 orang yang berjenis kelamin laki-laki dan 4.109 orang yang berjenis kelamin perempuan.

b. Penduduk Menurut Kepala Keluarga di Kelurahan Nelayan Indah

Berdasarkan rekapitulasi data Kelurahan Nelayan Indah terdapat 2012 KK terdiri dari 4.404 Laki-laki dan 4.109 perempuan.

**Tabel 4.3**

**Jumlah Kepala Keluarga di Kelurahan Nelayan Indah**

Lingkungan	Jumlah KK	Laki-laki	Perempaun	Jumlah Jiwa
I	276 KK	603 Orang	562 Orang	1.165 Orang
II	290 KK	649 Orang	646 Orang	1.295 Orang
III	210 KK	462 Orang	419 Orang	881 Orang
IV	206 KK	463 Orang	377 Orang	840 Orang
V	241 KK	465 Orang	454 Orang	919 Orang
VI	333 KK	724 Orang	654 Orang	1.378 Orang
VII	205 KK	486 Orang	495 Orang	981 Orang
VIII	258 KK	569 Orang	531 Orang	1.100 Orang
Total	2012 KK	4.404 Orang	4.109 Orang	8.513 ang

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

c. Mata Pencaharian

Jumlah penduduk di Kelurahan Nelayan Indah berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah ( orang )	Persentase ( % )
1	Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	3 Orang	0,15
2	Buruh usaha jasa transportasi/ ojek	255 orang	13,5

3	Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi	7 orang	0,37
4	Kontraktor	25 orang	1,32
5	Buruh jasa hiburan dan pariwisata	14 orang	0,74
6	Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya	3 orang	0,15
7	Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	23 orang	1,2
8	Pegawai Negeri Sipil	38 orang	2
9	Pengrajin industri rumah tangga	15 orang	0,79
10	Pedagang keliling	127 orang	6,75
11	Peternak	41 orang	2,17
12	Nelayan	725 orang	38,5
13	Montir	18 orang	0,95
14	Bidan swasta	3 orang	0,15
15	Pembantu rumah tangga	33 orang	1,75
16	TNI/POLRI	2 orang	0,1
17	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	17 orang	0,9
18	Pengusaha kecil dan menengah	31 orang	1.64
19	Pengacara/notaris	2 orang	0,1
20	Jasa pengobatan alternative	10 orang	0,53
21	Dosen swasta	2 orang	0,1
22	Karyawan perusahaan swasta	271 orang	14,4
23	Jasa penyewa peralatan pesta	7 orang	0,37
24	Wiraswasta lainnya	81 orang	4,3
25	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	128 orang	6,8
Total		1.881	100

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa penduduk kelurahan Nelayan Indah umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan sebesar 38,5 %. Sumber daya yang tersedia baik dari alam maupun manusia yang mendukung adalah sektor perikanan, sehingga banyak nelayan yang bergantung pada mata pencaharian sebagai nelayan.

- d. Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan Nelayan Indah Tahun 2017.

**Tabel 4.5**

**Penduduk Menurut Agama/Aliran Kepercayaan di Kelurahan Nelayan Indah**

No	Agama	Jumlah ( Orang )	Persentase ( % )
1	Islam	8.469	99,48
2	Kristen Protstan/Katolik	44 orang	0,52
3	Hindu/Budha	0	0
Total		8.513	100

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

Dari Tabel 4. 5 ternyata penduduk Kelurahan Nelayan Indah lebih banyak menganut agama Islam yaitu (99,48%) 8.469 jiwa, sedangkan sisanya menganut agama Kristen protestan dan Khatolik (0,52%) 44 jiwa.

**4. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan parasarana di Kelurahan Nelayan Indah akan mempengaruhi perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kelurahan tersebut. Semakin baik sarana dan prasarana yang ada maka dapat mempercepat laju perkembangan Kelurahan tersebut.

**Tabel 4.6**

**Sarana dan Prasarana di Kelurahan Nelayan Indah**

No	Uraian	Jumlah
1	Taman kanak-kanak	4 unit

2	RA ( Raudhatul Athfal )	2 unit
3	PAUD	3 unit
4	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah	4 unit
5	SLTP	1 unit
6	SLTA/ sederajat	1 unit
7	Masjid	3 unit
8	Musholla	6 unit
9	PUSTU ( puskesmas Pembantu )	1 unit
10	Jembatan	1 unit
11	TPI ( tempat Pendaratan Ikan )	1 unit

Sumber: Kantor Kelurahan Nelayan Indah, 2017

Berdasarkan Tabel 4.5 ketersediaan sarana dan prasarana di Kelurahan Nelayan Indah sudah dapat terpenuhi baik dibidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, transportasi, perekonomian, maupun sosial. Dengan sumber daya yang tersedia, maka masyarakat mampu mengolah dan memanfaatkan untuk hal yang berguna.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan penulis dalam pembahasan skripsi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap pertama penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu Kelurahan Nelayan Indah kecamatan Medan Labuhan mengenai masalah dampak Permen KP No 1 Tahun 2015 terhadap pendapatan nelayan.
- b. Tahap kedua penulis akan menyebarkan kuisisioner yang telah dipersiapkan untuk dijawab oleh responden atau sampel yang telah ditetapkan.
- c. Tahap selanjutnya penulis mengumpulkan semua data-data baik yang bersifat dokumentasi, dan dari hasil kuisisioner.

### **1. Karakteristik Responden**

a. Umur responden

Umur merupakan data yang sangat penting karena umur erat kaitannya dengan perilaku seseorang misalnya kesehatan, kelahiran, kematian, pendidikan, kegiatan ekonomi dan lainnya. Karakteristik responden dari umur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.7**

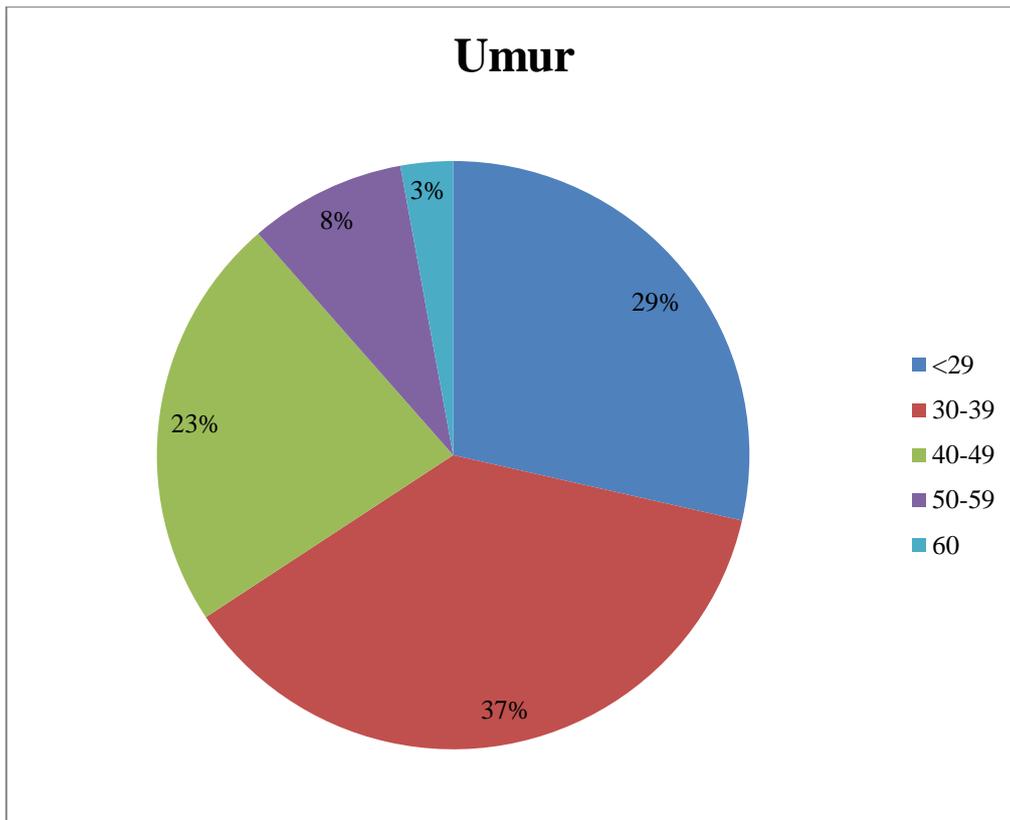
**Karakteristik Responden Menurut Umur**

No	Kelas Interval	Frekuensi	Persentase (%)
1	< 29	10	28,57
2	30-39	13	37,14
3	40-49	8	22,86
4	50-59	3	8,57
5	$\geq 60$	1	2,86
Jumlah		35	100

Sumber Data Primer 2017 dari responden yang diolah

Dari tabel 4.7 dapat diketahui bahwa umur responden adalah sebesar 28,57% untuk umur < 29 tahun, sebesar 37,14% untuk umur 30-39 tahun, sebesar 22,86% untuk umur 40-49 tahun, sebesar 8,57 untuk umur 50-59 tahun, dan sebesar 2,86% untuk umur  $\geq 60$  tahun.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 35 responden, frekuensi terbesar karakteristik responden berdasarkan umur adalah umur 30-39 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 37,14%.



**Gambar 4.1**

**Umur Responden**

Ket: penjelasan pada gambar adalah persentase umur responden dari umur <29 tahun sampai dengan umur 60 tahun.

**b. Tingkat Pendidikan Responden**

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh responden. Mengenai tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh responden dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**

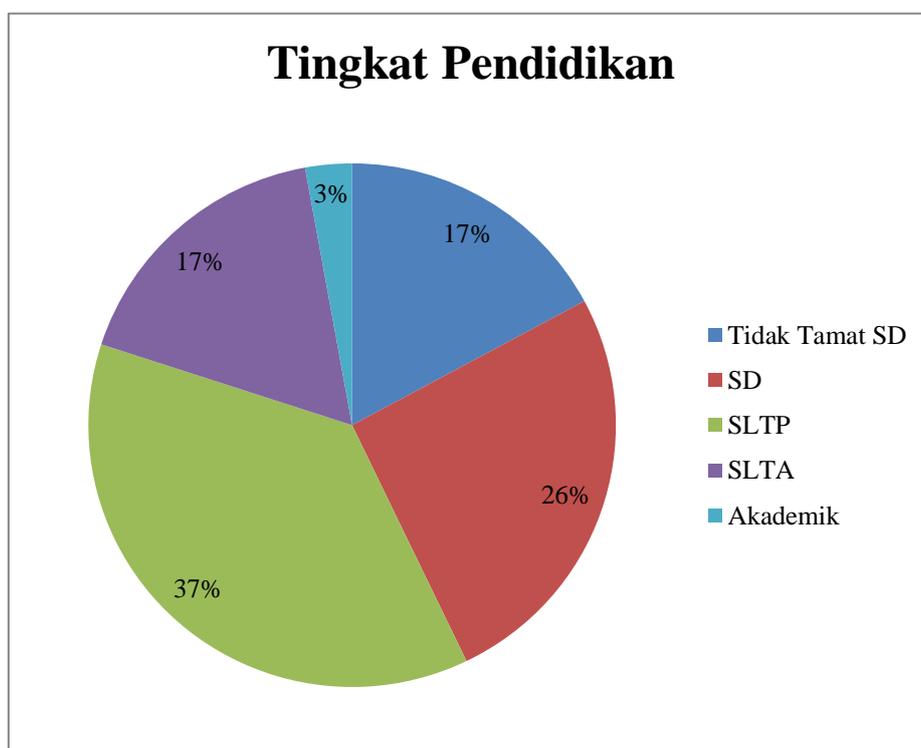
**Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	6	17,14
2	SD	9	25,71
3	SLTP	13	37,14
4	SLTA	6	17,14
5	Akademik	1	2,86
Jumlah		35	100

Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dicapai responden adalah sebesar 17,14% tidak tamat SD, sebesar 25,71% tamat SD, sebesar 37,14% tamat SLTP, 17,14% tamat SLTA, dan sebesar 2,86% tamat akademik

Secara umum responden memiliki tingkat pendidikan hanya tamat SLTP, hal ini disebabkan bahwa anggapan biaya pendidikan masih mahal dan keinginan untuk bersekolah masih rendah.



**Gambar 4.2**

## Tingkat Pendidikan Responden

Ket: penjelasan gambar adalah persentase tingkat pendidikan responden dari tidak tamat SD sampai akademik.

### c. Status Kepemilikan Rumah

Status kepemilikan rumah seseorang sangat dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diperoleh seseorang, karena dengan jumlah pendapatan yang besar seseorang akan cenderung memilih memiliki rumah sendiri dibandingkan harus menyewa, mengontrak ataupun menumpang. Status kepemilikan rumah seseorang merupakan salah satu penentu apakah seseorang sudah mapan dalam hal *financial* (keuangan) karena status kepemilikan rumah dipengaruhi salah satu faktor ekonomi yaitu pendapatan. Untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan rumah responden dapat dilihat pada tabel berikut.

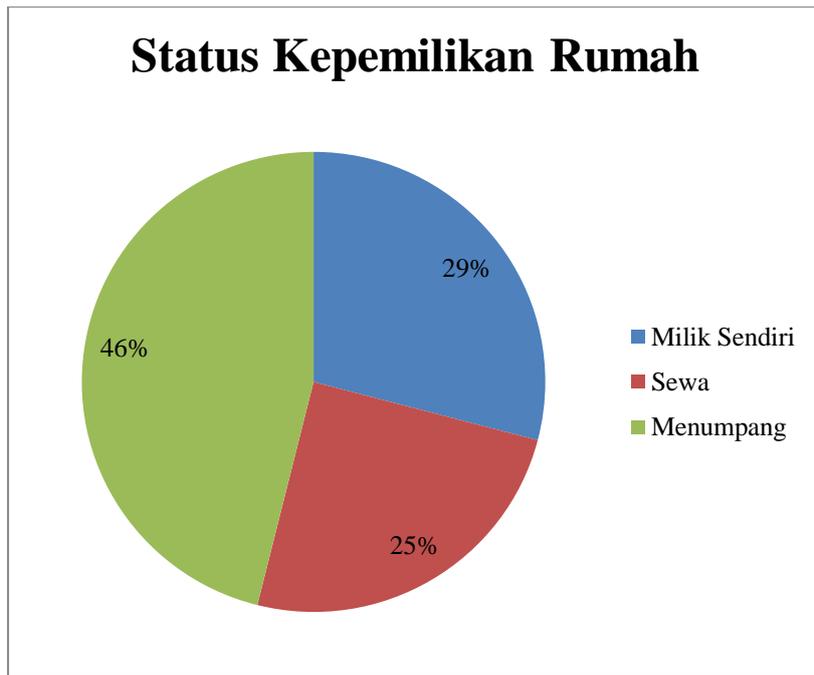
**Tabel 4.9**

### **Status Kepemilikan Rumah Nelayan Penangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan 2017**

No	Status Kepemilikan Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Milik sendiri	15	42,86
2	Sewa	7	20
3	Menumpang	13	37,14
Jumlah		35	100

Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah

Berdasarkan data pada Tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa status kepemilikan rumah responden milik sendiri sebesar 42,86% atau sebanyak 15 responden. Sewa Sebanyak 7 atau 20%, responden memilih untuk menyewa ataupun mengontrak rumah, hal ini disebabkan karena kurangnya keuangan para responden, selain itu banyak dari responden yang memang pendatang (transmigran) untuk mencari nafkah di tempat tersebut. Menumpang sebanyak 13 atau 37,14% karena responden belum menikah atau masih tinggal dirumah orang tua/ kerabat.



**Gambar 4.3**

### Status Kepemilikan Rumah Responden

Ket: penjelasan gambar adalah persentase status kepemilikan rumah responden.

d. Tipe Bangunan Fisik Rumah

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena rumah sebagai pelindung manusia dari pergantian cuaca dan musim yang dapat mempengaruhi kondisi fisik manusia itu sendiri. Untuk melihat bagaimana kondisi fisik rumah kepala keluarga nelayan maka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

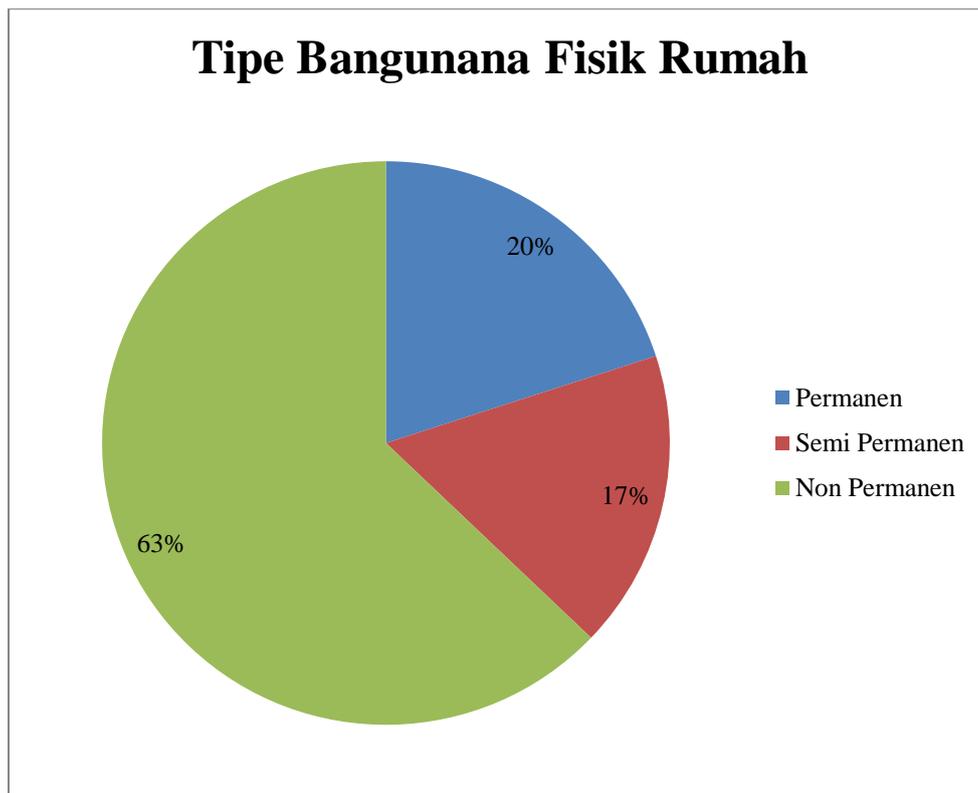
**Tabel 4.10**

**Tipe Bangunan Fisik Rumah Nelayan Tangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah**

No	Tipe Bangunan fisik rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Permanen	7	20
2	Semi permanen	6	17,14
3	Non permanen	22	71,43
Jumlah		35	100

Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 6 responden (17,14%) memiliki tipe bangunan rumah semi permanen, 7 responden (20%) memiliki tipe bangunan rumah permanen, dan 22 responden (71,43%) memiliki tipe bangunan rumah non permanen. Kondisi fisik rumah responden sangat dipengaruhi oleh pendapatan, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh para responden maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai rumah yang lebih permanen. Kondisi ini sesuai dengan pendapat bahwa kondisi fisik rumah sangat dipengaruhi oleh pendapatan, karena semakin tinggi pendapatan yang diperoleh seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk mempunyai rumah yang lebih permanen, seperti dikemukakan oleh M. Kasim dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dieters Evers sebagai berikut: "pendapatan seseorang mempunyai hubungan yang erat dengan tipe perumahan yang ditempati. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula kemungkinan untuk menempati rumah yang permanen".



**Gambar 4.4**

#### Tipe Bangunan Responden

Ket: penjelasan gambar adalah persentase tipe bangunan rumah responden.

#### e. Jenis Perahu Yang Digunakan

Jenis perahu adalah sarana transportasi laut yang digunakan nelayan untuk menangkap kepiting. Jenis perahu dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi jenis perahu bermotor dan jenis perahu tanpa motor. Perahu bermotor yaitu perahu yang menggunakan mesin (motor) sebagai penggerak perahu sedangkan perahu tanpa motor yaitu perahu yang tidak menggunakan mesin (motor) melainkan layar atau dayung sebagai penggerak perahu yang digunakan. Untuk mengetahui jumlah jenis perahu yang digunakan oleh nelayan dapat dilihat pada tabel berikut:

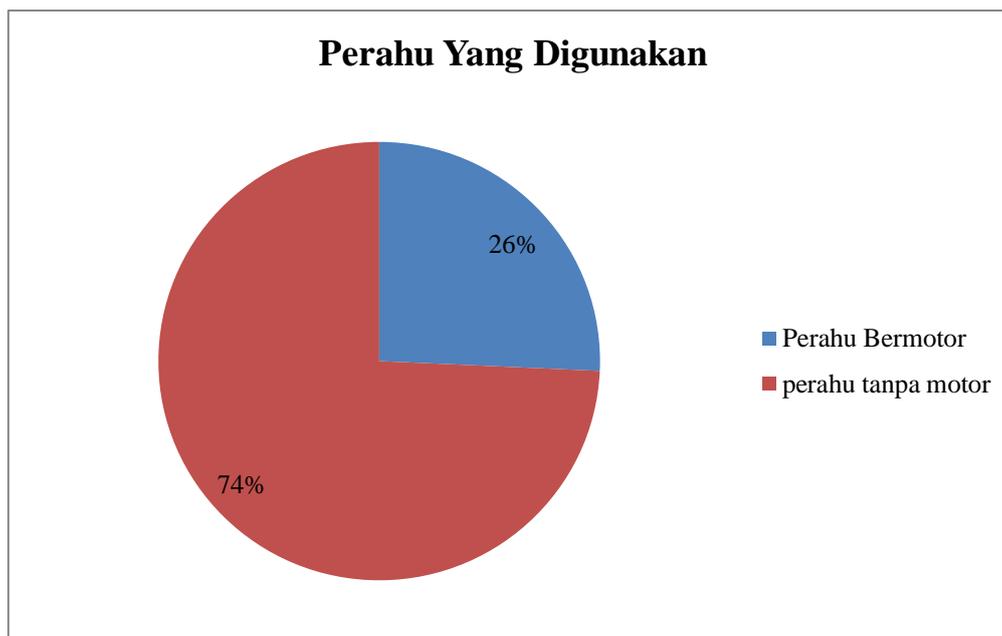
**Tabel 4.11**

**Jumlah Responden Menurut Jenis Perahu yang Digunakan Nelayan Tangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.**

No	Jenis Perahu	Frekuensi	Persentase (%)
1	Perahu bermotor	6	17,14
2	Perahu tanpa motor	29	82,86
Jumlah		35	100

Sumber : Data Primer 2017 dari responden yang diolah

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan penangkap kepiting menggunakan perahu tanpa motor atau perahu dayung untuk melaut, dikarenakan jarak tempuh nelayan untuk melaut tidak terlalu jauh sehingga tidak bergantung kepada perahu yang bermotor. Untuk perahu bermotor sebanyak 6 responden atau 17,14%, dan untuk perahu tanpa motor sebanyak 82,86%. Sehingga dapat diketahui perahu yang digunakan nelayan masih tergolong tradisional.



**Gambar 4.5**

**Perahu yang Digunakan Responden**

Ket: penjelasan gambar adalah persentase perahu yang digunakan responden.

**2. Deskripsi Variabel Penelitian**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji analisis data, artinya sebelum melakukan analisis yang sesungguhnya, data penelitian tersebut harus diuji kenormalan distribusinya. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi

data normal atau mendekati normal. Normalitas data bertujuan untuk mengetahui data distribusi normal atau tidak.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Normalitas**

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
		SebelumPeraturan	SesudahPeraturan
N		35	35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2597142,86	1488571,43
	Std. Deviation	557560,714	465119,484
	Absolute	,194	,225
Most Extreme Differences	Positive	,141	,225
	Negative	-,194	-,150
Kolmogorov-Smirnov Z		1,145	1,329
Asymp. Sig. (2-tailed)		,145	,058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Kelebihan dari uji ini sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas grafik.

Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Namun, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, artinya data yang kita uji normal.

Berdasarkan output di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,058 dan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

b. Uji T (*T-Test*)

Uji T digunakan untuk mengetahui perbedaan pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan. Perhitungan t (uji t) merupakan suatu perhitungan untuk mencari perbedaan atau uji beda. Nilai dari uji t sebelum peraturan yang telah diketahui kemudian dibandingkan dengan nilai t sesudah peraturan. Rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dikatakan berbeda signifikan terhadap rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan apabila nilai signifikan  $> 0.05$ . Hal ini menunjukkan terdapat perbedaan yang cukup berarti dari rata-rata pendapatan nelayan sebelum peraturan dan sesudah peraturan. Sebaliknya, apabila nilai signifikan  $< 0.05$  tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

### Hipotesis

$H_0$  = diterima bila nilai signifikan  $> 0.05$  Artinya rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan sama dengan rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan.

$H_a$  = ditolak bila nilai signifikan  $< 0.05$  Artinya rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan tidak sama dengan rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan.

**Tabel 4.13**

### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SebelumPeraturan & SesudahPeraturan	35	,594	,000

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah oleh SPSS (2017)

Dari tabel output Paired Samples Statistics tersebut di atas dapat diketahui bahwa korelasi antara sebelum dan sesudah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015 sebesar 0,594 sehingga terdapat hubungan signifikan.

**Tabel 4.14****Paired Samples Statistics**

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SebelumPeraturan	2597142,86	35	557560,714	94244,962
	SesudahPeraturan	1488571,43	35	465119,484	78619,542

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah oleh SPSS (2017)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwasannya rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan 2597142,86 dan rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan 1488571,43. Sehingga, dapat disimpulkan pendapatan nelayan berkurang setelah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015.

**Tabel 4.15****Hasil Uji t****Paired Samples Test**

	Paired Differences				T	Df	Sig. (2-tailed)	
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower				Upper
SebelumPeraturan – SesudahPeraturan	1108571,429	468019,248	79109,692	947801,192	1269341,665	14,013	34 ,000	

Sumber: Hasil Penelitian yang diolah oleh SPSS (2017)

Dari tabel Paired Samples Test di atas dapat kita ketahui bahwa sig adalah 0,000. Hal ini berarti lebih kecil dari 0,005. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jadi Permen KP No 1 Tahun 2015 terbukti memberikan dampak terhadap pendapatan nelayan.

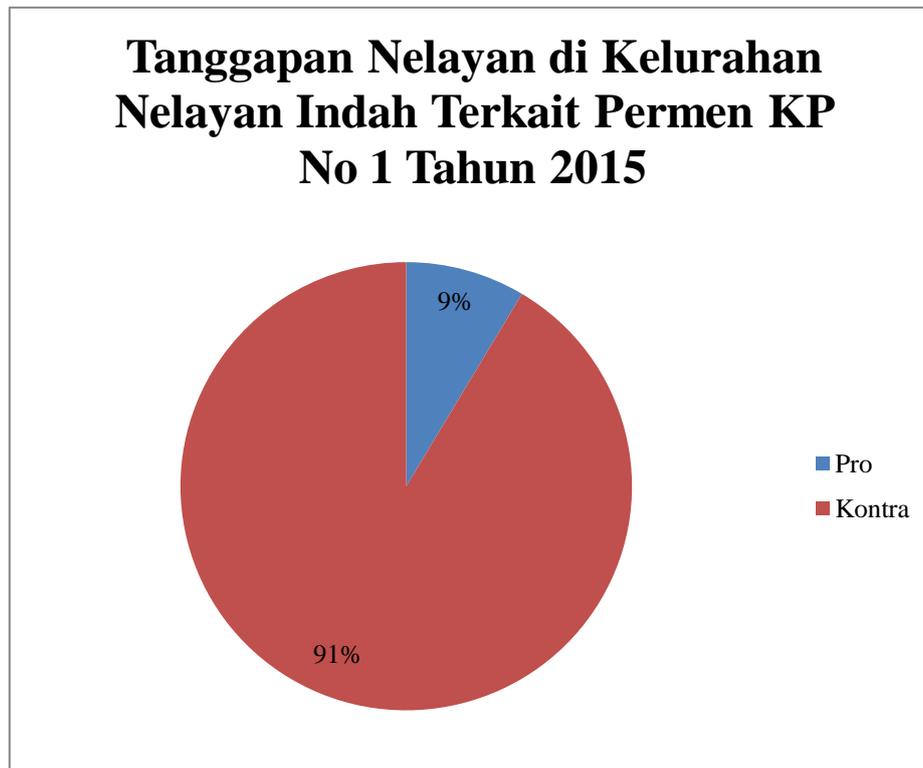
Dari tabel di atas dapat dilihat signifikansi = 000 > 0,005 sehingga dapat diartikan rata-rata pendapatan nelayan sebelum adanya peraturan tidak sama dengan rata-rata pendapatan nelayan sesudah adanya peraturan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Permen KP No 1 Tahun 2015 berdampak terhadap pendapatan nelayan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Persepsi Nelayan Tangkap Kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Terhadap Permen KP No 1 Tahun 2015**

Nelayan di Kelurahan Nelayan Indah, khususnya yang melakukan penangkapan kepiting di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan umumnya telah mengetahui adanya Permen KP No.1/2015. Nelayan mengetahui pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 ini dari media televisi dan dari toke/pengumpul kepiting. Menurut nelayan, Permen KP No. 1/2015 tersebut dikatakan sulit untuk diterapkan oleh kalangan nelayan. Hal ini dikarenakan toke/pengumpul masih bersedia membeli kepiting dalam segala kondisi, baik yang sedang bertelur maupun yang tidak bertelur, dan ukuran lebar karapasnya pun < 10 cm. Namun, ada beberapa nelayan yang telah sadar akan tujuan ditetapkannya Permen KP No.1 /2015 yaitu untuk menjaga kelestarian sumberdaya kepiting di perairan Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan agar anak cucunya kelak masih dapat menikmati sumberdaya alam hayati berupa kepiting tersebut, yaitu dengan cara melepaskan kepiting yang berukuran kecil atau panjang karapasnya dibawah 10 cm dan melepaskan kepiting yang sedang dalam keadaan bertelur. Hal ini bertujuan agar kepiting dapat berkembang biak. Dari 35 responden, yang menyetujui pemberlakuan Peremen Kp No 1 tahun 2015 hanya 3 orang saja, sehingga dapat dikatakan mayoritas nelayan tidak menyetujui pemberlakuan Permen Kp No 1 Tahun 2015 ini. Nelayan sangat berharap ada tindakan dari pemerintah mengenai kondisi yang dialami mereka, dan mereka sangat berharap agar keputusan yang telah dibuat oleh Menteri kelautan

dan Perikanan dikaji kembali. Karena hanya dari sumber tangkap kepiting sajalah mereka bergantung untuk menafkahi keluarga mereka, sehingga nelayan tangkap kepiting sangat mengharapkan solusi dari dinas terkait mengenai kondisi ekonomi mereka.



**Gambar 4.6**

**Tanggapan Nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Terkait Permen No 1 Tahun 2015**

Ket: Penjelasan gambar adalah persentase responden yang pro dan kontra terhadap Permen KP No 1 Tahun 2015.

**2. Dampak Permen KP No 1 Tahun 2015**

Penelitian ini akan melihat dampak-dampak yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya peraturan menteri kelautan dan perikanan No 1 tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal terhadap pendapatan nelayan. Dampak yang dialami nelayan setelah adanya peraturan ini yaitu penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Yang mana sebelum adanya peraturan ini nelayan mampu untuk menghidupi keluarganya lebih dari cukup. Namun, setelah adanya peraturan ini nelayan tidak mampu

menghidupi keluarganya. Adapun hasil pendapatan sebelum adanya permen KP No 1 Tahun 2015 dan sesudah adanya permen KP No 1 tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**

**Jumlah Pendapatan Nelayan Sebelum dan Sesudah Adanya Permen KP No 1  
Tahun 2015**

No	Nama Nelayan	Pendapatan Sebelum Peraturan (Rupiah)	Pendapatan Sesudah Peraturan (Rupiah)
1	Anas	2.000.000	1.000.000
2	Riza	3.000.000	1.500.000
3	Jarot	3.000.000	2.500.000
4	Hendra	3.500.000	1.000.000
5	Agus	2.000.000	1.000.000
6	Ismail	2.500.000	1.000.000
7	Nuar	1.500.000	1.000.000
8	Karim	2.000.000	1.000.000
9	Amri	3.000.000	2.000.000
10	Rahman	2.000.000	1.500.000
11	Ari	3.000.000	2.000.000
12	Adi	2.500.000	1.000.000
13	Husni	3.000.000	2.000.000
14	Yunus	3.000.000	1.500.000
15	Mulkan	2.500.000	1.500.000
16	Munik	2.500.000	2.000.000
17	Umar	3.000.000	1.000.000
18	Abdullah	2.500.000	1.000.000
19	Dayat	3.000.000	1.500.000
20	Udin	2.500.000	1.500.000

21	Effendi	3.000.000	2.000.000
22	Chandra	1.500.000	1.000.000
23	Amirsyah	3.500.000	2.500.000
24	Bahniar	3.500.000	2.000.000
25	Rustam	2.100.000	1.500.000
26	Sapri	1.800.000	1.000.000
27	Eko	2.000.000	1.000.000
28	Erdianto	3.500.000	2.100.000
29	Afrizal	2.500.000	1.000.000
30	Marwan	3.000.000	1.500.000
31	Rizqy	3.000.000	2.000.000
32	Supriadi	2.500.000	1.500.000
33	Faisal	2.000.000	1.000.000
34	Jefri	2.500.000	1.500,000
35	Putra	3.000.000	1.500.000

Sumber hasil wawancara kepada responden

Dari tabel 4.16 di atas dapat dilihat perbedaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya peraturan. Pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 menyebabkan dampak terhadap nelayan, dampak yang paling terasa bagi nelayan adalah berkurangnya pendapatan. Menurut salah seorang nelayan bahwasannya jumlah tangkapan kepiting tidak berkurang sama sekali. Bahkan, mereka tetap menangkap kepiting yang dilarang untuk ditangkap seperti kepiting dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal. Walaupun hasil tangkapan kepiting sebelum adanya peraturan dan sesudah adanya peraturan sama. Namun, hasil jual tangkapan kepiting yang menurun. Untuk kepiting yang bertelur sebelum adanya Peremen KP NO 1 Tahun 2015 dihargai Rp. 350.000 setelah adanya Peremen KP No1 tahun 2015 menjadi Rp. 70.000/kg, dan untuk jenis kepiting jantan ukuran > 350 gram sebelum adanya peraturan dihargai Rp. 200.000 setelah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015 menjadi Rp. 50.000/kg, yang disebabkan kepiting yang bertelur yang selama ini menjadi

komoditas atau diminati pasar tidak diperbolehkan lagi ditangkap sehingga mempengaruhi pasar, menyebabkan harga kepiting anjlok dipasaran. Sehingga, harga kepiting anjlok dipasaran. Menurut toke kepiting, setelah pemberlakuan permen KP ini mereka tidak dapat lagi mengekspot kepiting yang bertelur karena sudah jelas dilarang. Namun, sebenarnya para nelayan tetap menangkap kepiting dalam kondisi bertelur tersebut dan toke masih menerima jenis kepiting tersebut, toke hanya menjual kepiting di pasar nasional saja biasanya secara ilegal. Karena jika ketahuan oleh penegak hukum khususnya Menteri Kelautan dan Perikanan mereka akan dikenakan sanksi. Walaupun sejauh ini peraturan tersebut belum mempunyai sanksi tegas, lain halnya peraturan mengenai pukot cantrang.

Untuk penjualan kepiting dalam negeri sendiri harga tentu tidak sama seperti penjualan luar negeri sehingga menyebabkan harga kepiting anjlok menurun dan diikuti penurunan harga oleh jenis kepiting lain. Sehingga menyebabkan pendapatan nelayan tangkap kepiting menurun. Padahal sudah jelas yang dilarang hanya kepiting dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal. Namun kenyataannya harga kepiting jenis lain pun ikut menurun.

Nelayan sangat menyesalkan pemberlakuan permen KP No 1 Tahun 2015 ini, menurut mereka pemberlakuan permen KP No 1 Tahun 2015 ini akan mematikan mata pencaharian mereka. Yang mana mereka hanya mengandalkan hasil tangkapan sebagai nelayan untuk menghidupi keluarga mereka.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan mengenai dampak Permen KP No 1 Tahun 2015 tentang pelarangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan terhadap pendapatan nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan. Maka penulis memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan uji t (*T-Test*), maka Permen KP No 1 Tahun 2015 berdampak kepada pendapatan nelayan karena berdasarkan pengujian, pendapatn nelayan sebelum adanya permen KP No 1 Tahun 2015 dan sesudah adanya Peremen KP No 1 Tahun 2015 berbeda signifikan. Hal ini dibuktikan dengan signifikan  $000 < 0.05$ .
2. Maka pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  di tolak, artinya Peremen KP No 1 Tahun 2015 berdampak kepada pendapatan nelayan di Kelurahan Nelayan Indah Kecamatan Medan Labuhan.
3. Dengan diberlakukannya Permen KP No. 1 Tahun berdampak negatif terhadap pendapatan nelayan kepiting di Kelurahan
4. pemberlakuan Permen KP No 1 Tahun 2015 harga jual kepiting menurun. Kepiting yang bertelur sebelum adanya Peremen KP NO 1 Tahun 2015 dihargai Rp. 350.000 setelah adanya Peremen KP No1 tahun 2015 menjadi Rp. 70.000/kg dan untuk jenis kepiting jantan ukuran  $> 359$  gram sebelum adanya peraturan dihargai Rp. 200.000 setelah adanya Permen KP No 1 Tahun 2015 menjadi Rp. 50.000/kg.mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah memberikan solusi bagi para nelayan yang merasakan dampak negatif dari Peraturan Menteri No 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster, dan rajungan dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal, dan pemerintah dapat

mempertimbangkan kembali Permen KP No 1 Tahun 2015 yang telah diberlakukan

2. Sebaiknya masyarakat nelayan dapat berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan peluang baru. Sehingga, masyarakat tidak terlalu bergantung kepada penghasilan dari hasil tangkap nelayan. Dengan begitu masyarakat dapat kehidupan yang layak.
3. Sebaiknya ada sosialisasi bagi masyarakat nelayan terhadap Peraturan Menteri No. 1 Tahun 2015 tentang larangan penangkapan kepiting, lobster dan rajungan dalam kondisi bertelur dan berukuran minimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabetha

Arif Satria, 2015, *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*, Jakarta:yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Badjuri, Abdulkahar dan Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*, Surabaya: In-Trans Publishing.
- BN. Marbun, 2003, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hery, 2012, *cara Mudah Memahami Akuntansi: Inti Sari Konsep Dasar Akuntansi*, (Jakarta: Prenadamedia Group..
- Marhaeni Ria Siambo, 2010, *Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto, 1984, *Nelayan dan kemiskinan*, Jakarta: Rajawali.
- Muhammad, 2008, *Metedologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Mulyadi S, 1998, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Reksoprayitno, 2004, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: Bina Grafika.
- Ruslam Ahmadi, 2014, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sugiyono, 1999 *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, *Mixed Methods*, Bandung: ALFABETA.
- Sujarno, 2010, *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan di Kabupaten Langkat*, Tesis Sarjana S2 program studi magister ekonomi pembangunan Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suryani, Hendryadi, 2015, *Metode Riset Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.

Syahrum dan Salim, 2012 *Metedologi Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka Media.

Syahrum dan Salim, 2014, *Metedologi Penletian Kuantitatif*, Bandung: Ciptapustaka.

Tohar, 200, *Membuka Usaha Kecil*, Yogyakarta: KANISIUS.

[www.bkpim.kkp.go.id](http://www.bkpim.kkp.go.id)

<http://kbbi.web.id/nelayan>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Halylyarti
2. Nim : 26133092
3. Tempat/tgl Lahir : Medan, 26 November 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Menikah
7. Agama : Islam
8. Kebangsaan : Indonesia
9. Alamat : Jl. Chaidir Blok CC No 38 Kelurahan Nelayan Indah  
Kecamatan Medan Labuhan



### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tahun 2001-2006 : SDN 068426 Medan Labuhan
2. Tahun 2006-2009 : SMPN 44 Medan
3. Tahun 2009-2013 : SMAS Hang Tuah Belawan

### **RIWAYAT ORGANISASI**

1. HMJ Ekonomi Perbankan Syariah : Tahun  
2015
2. KABID LITBANG DEMA FEBI UIN SU : Tahun  
2016



PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN  
RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. Bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);
- b. Bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.);

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
4. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (*Panulirus* spp.), KEPITING (*Scylla* spp.), DAN RAJUNGAN (*Portunus pelagicus* spp.).

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

### **Pasal 2**

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur.

### **Pasal 3**

- (1) Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dapat dilakukan dengan ukuran:
- a. Lobster (*Panulirus* spp.) dengan ukuran panjang karapas >8 cm (di atas delapan sentimeter);
  - b. Kepiting (*Scylla* spp.) dengan ukuran lebar karapas >15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
  - c. Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dengan ukuran lebar karapas >10 cm (di atas sepuluh sentimeter).
- (2) Cara Pengukuran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### **Pasal 4**

Setiap orang yang menangkap Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) wajib:

- a. melepaskan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
- b. melakukan pencatatan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

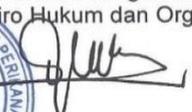
Pada tanggal 6 Januari 2015

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAM  
REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono

YASONNA H. LAOLY

No	Nama Nelayan	Pendapatan Sebelum Peraturan (Rupiah)	Pendapatan Sesudah Peraturan (Rupiah)
1	Anas	2.000.000	1.000.000
2	Riza	3.000.000	1.500.000
3	Jarot	3.000.000	2.500.000
4	Hendra	3.500.000	1.000.000
5	Agus	2.000.000	1.000.000
6	Ismail	2.500.000	1.000.000
7	Nuar	1.500.000	1.000.000
8	Karim	2.000.000	1.000.000
9	Amri	3.000.000	2.000.000
10	Rahman	2.000.000	1.500.000
11	Ari	3.000.000	2.000.000
12	Adi	2.500.000	1.000.000
13	Husni	3.000.000	2.000.000
14	Yunus	3.000.000	1.500.000
15	Mulkan	2.500.000	1.500.000
16	Munik	2.500.000	2.000.000
17	Umar	3.000.000	1.000.000
18	Abdullah	2.500.000	1.000.000
19	Dayat	3.000.000	1.500.000
20	Udin	2.500.000	1.500.000
21	Effendi	3.000.000	2.000.000
22	Chandra	1.500.000	1.000.000
23	Amirsyah	3.500.000	2.500.000
24	Bahniar	3.500.000	2.000.000
25	Rustam	2.100.000	1.500.000
26	Sapri	1.800.000	1.000.000
27	Eko	2.000.000	1.000.000
28	Erdianto	3.500.000	2.100.000
29	Afrizal	2.500.000	1.000.000
30	Marwan	3.000.000	1.500.000
31	Rizqy	3.000.000	2.000.000

32	Supriadi	2.500.000	1.500.000
33	Faisal	2.000.000	1.000.000
34	Jefri	2.500.000	1.500.000
35	Putra	3.000.000	1.500.000

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		SebelumPeraturan	SesudahPeraturan
N		35	35
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	2597142,86	1488571,43
	Std. Deviation	557560,714	465119,484
	Absolute	,194	,225
Most Extreme Differences	Positive	,141	,225
	Negative	-,194	-,150
Kolmogorov-Smirnov Z		1,145	1,329
Asymp. Sig. (2-tailed)		,145	,058

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

#### Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	SebelumPeraturan	2597142,86	35	557560,714	94244,962
	SesudahPeraturan	1488571,43	35	465119,484	78619,542

#### Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	SebelumPeraturan & SesudahPeraturan	35	,594	,000

**Paired Samples Test**

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 SebelumPera- turan SesudahPera- turan	1108571,429	468019,248	79109,692	947801,192	1269341,665	14,013	34	,000

## **KUISIONER PENELITIAN**

### **DAMPAK PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NO 1 TAHUN 2015 TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KEPITING DI KELURAHAN NELAYAN INDAH KECAMATAN MEDAN LABUHAN**

#### **A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Umur :

Pendidikan terakhir :

#### **B. NELAYAN TANGKAP KEPITING**

1. Apakah bapak/ ibu merupakan nelayan tangkap kepiting ?
  - a. Ya
  - b. Tidak
2. Apakah bapak/ibu mengetahui peraturan menteri kelautan dan perikanan No. 1 Tahun 2015?
  - a. Ya
  - b. Tidak
3. Apakah menurut pendapat bapak/ ibu permen Kp yang dikeluarkan oleh menteri Kelautan dan Perikanan berdampak kepada pendapatan bapak/ibu?
4. Apakah bapak setuju dengan pemberlakuan Peremen KP No 1 Tahun 2015?
  - a. Ya
  - b. Tidak
5. Bila dilihat dari kepemilikan perahu, apa status perahu yang bapak/ibu gunakan dalam menangkap ikan di laut ?
  - a. Sewa
  - b. Milik Sendiri
6. Apa jenis perahu yang bapak/ibu gunakan untuk menangkap kepiting ?
  - a. Perahu bermotor
  - b. Perahu tanpa motor
7. Dalam 1 bulan berapa kali bapak/ibu melaut?
  - a. 1 kali
  - b. 2 kali
  - c. 3 kali
  - d. Lebih dari 3 kali
8. Berapa biaya produksi yang dikeluarkan untuk satu kali melaut ?

Rp.....

#### **C. PERMEN KP NO 1 TAHUN 2015**

9. Apakah bapak/ibu mengetahui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 tahun 2015?
- a. Ya                      b. Tidak
10. Apakah bapak/ibu setuju dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 tahun 2015?
11. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 tahun 2015 ini?
- Jawab:.....

#### **D. JUMLAH PEROLEHAN TANGKAPAN**

12. Berapa kg (kilogram) jumlah tangkapan yang bapak/ ibu peroleh setiap kali bekerja sebagai Nelayan tangkap kepiting ?
- Jawab : ... kg
13. Apakah setelah adanya peraturan dari menteri KP hasil tangkapan bapak/ibu berkurang ?
- a. Ya                      b. Tidak
14. Jika “ ya “ berapa hasil tangkapannya ?
- Jawab : ... Kg

#### **E. PENDAPATAN**

15. Berapa pendapatan dari menangkap kepiting selama 1 kali melaut ?
- Rp...
16. Berapakah rata-rata pendapatan yang bapak/ibu terima per bulannya dari bekerja sebagai nelayan tangkap kepiting?
- Rp...
17. Berapa pendapatan bapak/ibu per bulannya sebelum adanya peraturan menteri KP No 1 Tahun 2015 ?
- Rp...
18. Berapa pendapatan bapak/ibu per bulannya setelah adanya peraturan menteri KP No 1 Tahun 2015 ?
- Rp...
19. Apakah bapak/ibu mempunyai pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan ?
- a. Ya                      b. Tidak

